



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 23
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan / Ke- 3
Dengan	: Kepala Desa Teluknaga Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, Lurah Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dan Plt. Bupati Kab. Bekasi
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Kamis, 18 Oktober 2018
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Teknis Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan : Permasalahan dan Perbaikan
Hadir	: orang dari 26 orang Anggota <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Desa Teluknaga Kec. Teluknaga Kab. Tangerang2. Perwakilan Lurah Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara3. Kadinsos Kabupaten Bekasi

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kabupaten Bekasi yang diwakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Lurah Kalibaru Kecamatan Cilincing Kotatiff Jakarta Utara yang diwakili sekretaris Kelurahan Kalibaru, dan Kepala Desa Teluknaga Kabupaten Tangerang membahas “**Teknis Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan: Permasalahan dan Perbaikan**” Dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa Teluknaga (Bapak Ady Surachman)
 - a. Kepala desa menerima data kemiskinan yang bersumber dari birokrasi diatasnya.
 - b. Kepala desa tidak dilibatkan dalam penyusunan data kemiskinan warganya.
 - c. Warga miskin yang tidak masuk dalam kategori miskin sering melakukan protes langsung Kepala desa, sedangkan kepala desa tidak dilibatkan dalam pendataan dan verifikasi.
 - d. Petugas lapangan pendata warga miskin terdiri dari petugas Kesra kecamatan (1 orang) dibantu oleh petugas dari kelurahan 1 orang untuk memverifikasi jumlah warga miskin yang berjumlah sekitar 1000an jiwa.
 - e. Kegiatan musyawarah Kepala desa untuk membahas data kemiskinan hanya bersifat formalitas
 - f. Kepala desa mengharapkan dalam melakukan pendataan warga miskin melibatkan kepala desa secara langsung.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi (Bapak H. Abdullah)
 - a. Data warga miskin di kabupaten Bekasi berjumlah 579.994 jiwa (hasil verifikasi pada tahun 2017)

- b. Petugas Cacah Lapangan (PCL) berasal dari pedamping PKH dan Pekerja Sosial Masyarakat yang berasal dari desa.
 - c. *Updating/Entry* data dipublikasikan 2 kali dalam setahun di bulan mei dan bulan november, namun untuk bulan oktober 2018 *updating/entry* data belum bisa dilakukan.
 - d. *Upload* data dikirimkan ke *server* Pusdatin Kemensos RI.
 - e. Kadinsos mengharapkan proses *upload* data oleh Pusdatin Kemensos RI bisa dilakukan secara cepat.
3. Sekretaris Kelurahan Kalibaru (Bapak Marsilam Tambunan)
- a. Kelurahan Kalibaru menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak di wilayah kota administratif jakarta utara.
 - b. Terdapat 5.388 jiwa rakyat miskin, dengan rincian 5.306 jiwa berasal dari penerima KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan 82 Jiwa berasal dari hasil rapat musyawarah kelurahan.
 - c. Jumlah Petugas Cacah Lapangan (PCL) di kelurahan kalibaru berjumlah 5 orang, jumlah tersebut masih membutuhkan tambahan petugas dan diusulkan menjadi 22 PCL di tahun 2019.
 - d. Sistem jaringan untuk *updating* data sering mengalami error (tidak stabil)
 - e. *Upload* data dikirimkan ke server TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)
 - f. Terdapat warga yang protes karena tidak masuk dalam kategori miskin dengan harapan mendapat bantuan program dari pemerintah ke kelurahan, namun setelah diverifikasi oleh petugas termasuk kategori bukan miskin. Warga yang protes menjelaskan bahwa banyak warga lainnya yang bukan masuk kategori miskin namun masuk kategori miskin yan kemudian mendapatkan bantuan program dari pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI
PANJA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN**

KETUA

Ttd.

Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si.